

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP) DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Andrea Pranika Maharani¹, Firna Ranadhiya Putri², Karina³, Regita Winda
Safitri⁴, Rinny Meidiyustiani, S.E., M.Akt.⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Budi Luhur,
Jakarta

Email: firmardp@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di Indonesia. Dengan menggunakan metode literature review, penelitian ini mengkaji berbagai jurnal, buku, dan laporan resmi terkait penerapan SAPP berbasis akrual. Hasil kajian menunjukkan bahwa SAPP telah meningkatkan kualitas, keterbukaan, dan aksesibilitas laporan keuangan pemerintah, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan mekanisme pertanggungjawaban. Namun, tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, kompleksitas regulasi, dan integrasi sistem informasi masih menjadi hambatan utama. Untuk itu, diperlukan pengembangan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi informasi, serta harmonisasi regulasi guna mendukung implementasi SAPP yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntansi Akrual, Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), Keuangan Negara, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Rekomendasi pengembangan SAP/SAPP, Sistem Akuntansi Pemerintah, Transparansi Akuntabilitas.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Central Government Accounting System (SAPP) in improving the transparency and accountability of state finances in Indonesia. Using a literature review method, this research examines various journals, books, and official reports related to the accrual-based SAPP implementation. The findings indicate that SAPP has

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no
80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

enhanced the quality, openness, and accessibility of government financial reports, thereby strengthening public trust and accountability mechanisms. However, challenges such as limited human resources, resistance to change, regulatory complexity, and information system integration remain significant obstacles. Therefore, human resource capacity development, optimization of information technology, and regulatory harmonization are required to support effective and sustainable SAPP implementation.

Keywords: *Accrual Accounting, Human resource (HR) limitations, State Finance, Budget Realization Report (LRA), Government Regulation No. 71 of 2010, SAP/SAPP development recommendations, Government Accounting System, Accountability Transparency.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) sebagai bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah. Implementasi SAPP diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang efektif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara (Manossoh, 2015; Oktavia et al., 2021).

Seiring dengan reformasi pengelolaan keuangan negara, penerapan SAP berbasis akrual melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 telah membawa perubahan signifikan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah dari basis kas ke basis akrual. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memberikan dasar pengukuran yang lebih baik untuk evaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah (Sinurat, 2018; IJAB, 2023)[3][7]. Namun demikian, implementasi SAPP masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kompleksitas regulasi yang memerlukan evaluasi menyeluruh guna memastikan sistem ini berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi pengelolaan keuangan negara (Supriyanto, 2024)

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, dengan harapan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian, kendala, serta rekomendasi pengembangan sistem akuntansi pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Manossoh, 2015; Oktavia et al., 2021).

Transparansi keuangan memungkinkan publik dan pemangku kepentingan mengakses informasi keuangan secara jelas dan tepat waktu, yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif (Sinurat, 2018).

Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban penuh atas penggunaan dana publik, yang diwujudkan melalui laporan keuangan yang dapat dipercaya dan sesuai standar (IJAB, 2023).

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) sebagai Bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAPP merupakan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah (Manossoh, 2015).

Sistem ini menggunakan basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yang menggantikan basis kas sebelumnya, sehingga laporan keuangan menjadi lebih lengkap dan akurat (Sinurat, 2018; IJAB, 2023).

SAPP terdiri dari dua subsistem utama: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terintegrasi untuk mencatat seluruh transaksi keuangan pemerintah pusat (Mukhtaromin, 2023; JagoAkuntansi, 2017).

Karakteristik dan Keunggulan SAPP

SAPP menggunakan prinsip pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping) yang memungkinkan pencatatan transaksi secara lengkap dan berimbang (Bandi FEB UNS, 2009).

Sistem ini bersifat terpadu dan desentralisasi, di mana unit-unit akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang terkait dana APBN melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang (HashMicro, 2025).

Penggunaan bagan akun standar yang seragam memudahkan konsistensi pelaporan dan pengawasan keuangan (KlikPajak, 2024).

Perbedaan SAPP dengan Sistem Akuntansi Lain

Berbeda dengan sistem akuntansi sektor swasta yang berorientasi pada laba dan menggunakan basis akrual penuh, SAPP menggabungkan basis kas dan akrual untuk

ISSN : 3025-9495

memenuhi kebutuhan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban publik (Accurate.id, 2024).

Fokus utama SAPP adalah pengendalian anggaran dan pemantauan ketaatan terhadap otorisasi anggaran, sedangkan sistem akuntansi komersial lebih menitikberatkan pada pengukuran profitabilitas (PPM School, 2023).

Sistem akuntansi pemerintah juga tunduk pada regulasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dana publik (Bandi FEB UNS, 2009).

Tantangan Implementasi SAPP

Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi berbasis akrual menjadi kendala utama dalam optimalisasi sistem (Supriyanto, 2024).

Resistensi terhadap perubahan teknologi dan prosedur baru menghambat penerapan SAPP secara efektif (Jemsi, 2024).

Kompleksitas regulasi dan kebutuhan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menambah tantangan pelaksanaan (Unsrat, 2023).

Upaya Pengembangan dan Peningkatan Implementasi SAPP

Pelatihan intensif dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci untuk mengatasi hambatan teknis dan non-teknis (Supriyanto, 2024).

Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal, termasuk integrasi sistem dan digitalisasi proses pelaporan, mendukung efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan (HashMicro, 2025).

Penyederhanaan regulasi dan harmonisasi standar akuntansi pemerintah diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan SAPP di seluruh instansi pemerintah (Jemsi, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif yang sistematis untuk mengevaluasi implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Metode ini dipilih karena memungkinkan penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai literatur sekunder yang relevan berupa jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi yang membahas kebijakan, penerapan, dan perkembangan sistem akuntansi pemerintah di Indonesia.

1. Pengumpulan Literatur

Data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti repositori institusi pemerintah, perpustakaan digital universitas, dan database jurnal nasional maupun internasional. Literatur yang dikaji meliputi penelitian empiris, kajian teoritis, serta dokumen kebijakan terkait SAPP dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Kriteria Seleksi Literatur

- Literatur yang dipilih adalah yang diterbitkan dalam kurun waktu 2010–2025 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan terbaru.
- Fokus pada studi yang membahas implementasi SAPP, transparansi, akuntabilitas, serta pengaruh SAP berbasis akrual.
- Literatur dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang memiliki metode penelitian jelas dan hasil yang kredibel.

3. Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Literatur yang terpilih dianalisis untuk mengidentifikasi tema utama, tren perkembangan, hambatan, serta rekomendasi terkait implementasi SAPP.

4. Sintesis Temuan

Hasil analisis disintesis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian implementasi SAPP dalam konteks transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, serta kendala dan solusi yang diusulkan dalam literatur.

No	Nama Penulis/Jurnal	Tahun	Judul/Topik Utama	Keterangan
1.	Manossoh	2015	Transparansi & Akuntabilitas Keuangan Negara	Mengulas konsep transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya di sektor publik.
2.	Oktavia et al.	2021	Good Governance & SAPP	Menganalisis hubungan antara penerapan SAPP dengan prinsip good governance, serta dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

3.	Sinurat	2018	Implementasi SAP Berbasis Akrual	Membahas tantangan dan strategi implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di lingkungan instansi pemerintah, serta kesiapan SDM.
4.	IJAB	2023	Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah	Mengevaluasi tingkat akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah melalui analisis dokumen dan studi kasus pada beberapa instansi.
5.	Mukhtaromin	2023	Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah	Mengkaji peran sistem akuntansi dalam mendukung pengelolaan keuangan instansi pemerintah, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.
6.	Supriyanto	2024	Keterbatasan SDM Akuntansi Pemerintah	Mengkaji permasalahan keterbatasan sumber daya manusia dalam implementasi SAPP dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
7.	Jemsi	2024	Tantangan Implementasi SAPP	Mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan SAPP, seperti aspek teknis, regulasi, dan budaya organisasi.
8.	Ahmad Arwani	2013	Aksesibilitas Informasi Keuangan Desa	Menganalisis akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa dan peran SAPP dalam meningkatkan transparansi di tingkat pemerintahan desa.
9.	Reinata	2021	Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah	Mengkaji mekanisme publikasi laporan keuangan pemerintah dan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta

				transparansi pengelolaan keuangan negara.
10.	IPDN	2023	Efektivitas Audit dan Pengawasan Keuangan Negara	Membahas peran audit dan pengawasan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara melalui penerapan SAPP dan sistem pengendalian internal pemerintah.
11.	Unsrat	2023	Sinkronisasi Regulasi Akuntansi Pemerintah	Membahas pentingnya sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah agar tercipta pelaporan yang konsisten dan akuntabel.
12.	KlikPajak	2024	Bagan Akun Standar Pemerintah	Menjelaskan struktur dan fungsi Bagan Akun Standar (BAS) dalam sistem akuntansi pemerintah, serta perannya dalam standarisasi pelaporan keuangan.
13.	Bandi FEB UNS	2009	Double Entry Bookkeeping pada Sektor Publik	Membahas penerapan prinsip double entry bookkeeping dalam akuntansi sektor publik dan perbedaannya dengan sektor swasta.
14.	HashMicro	2025	Integrasi Sistem Informasi Pemerintah	Mengulas pentingnya integrasi sistem informasi dalam mendukung efektivitas SAPP serta contoh penerapannya di beberapa instansi pemerintah.
15.	PPM School	2023	Pengendalian Anggaran Pemerintah	Menganalisis mekanisme pengendalian anggaran di lingkungan pemerintah serta peran SAPP dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran.

HASIL

Berdasarkan kajian literatur yang komprehensif, implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia telah menunjukkan berbagai hasil dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Temuan kunci dikategorikan berdasarkan aspek-aspek utama evaluasi:

1. Peningkatan Transparansi Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan yang Lebih Baik: SAPP, yang berlandaskan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual (sesuai PP No. 71 Tahun 2010), telah meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan tersebut menjadi lebih relevan, informatif, dan andal karena mencatat transaksi secara komprehensif, termasuk aset dan kewajiban yang belum terealisasi, tidak hanya berdasarkan basis kas (Jemsi, 2024;). Hal ini memungkinkan laporan keuangan untuk menggambarkan kondisi finansial pemerintah secara lebih akurat dan lengkap.

Aksesibilitas Informasi yang Meningkat: Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, semakin aktif mempublikasikan laporan keuangannya melalui berbagai platform digital dan media publik. Praktik transparansi seperti pemasangan spanduk laporan keuangan desa, publikasi di website resmi instansi, atau pengumuman dalam forum terbuka, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi penggunaan anggaran (Ahmad Arwani, 2013; Reinata, 2021). Peningkatan aksesibilitas ini mendorong partisipasi publik dalam pengawasan keuangan.

Opini Audit BPK yang Positif: Peningkatan kualitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang secara konsisten diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam beberapa tahun terakhir. Opini ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dan bahwa SAPP telah berfungsi sesuai standar, mendukung peningkatan kepercayaan publik ([7]).

2. Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Basis Akrual untuk Akuntabilitas Menyeluruh: Dengan basis akrual, SAPP memungkinkan pencatatan seluruh transaksi ekonomi, bukan hanya aliran kas. Ini meliputi pengakuan aset dan kewajiban secara tepat waktu, yang memberikan gambaran utuh mengenai posisi keuangan pemerintah. Akibatnya, laporan keuangan menjadi alat pertanggungjawaban yang lebih kuat dan akurat bagi penggunaan dana publik.

Mekanisme Pertanggungjawaban yang Jelas: SAPP menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar pertanggungjawaban pemerintah kepada legislatif dan masyarakat, memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah secara relevan menjadikan laporan keuangan sebagai acuan pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan (IPDN, 2023).

Efektivitas Pengawasan dan Audit: Laporan keuangan yang berkualitas tinggi mempermudah pelaksanaan audit internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan audit eksternal oleh BPK. Data yang akurat dan transparan mempermudah auditor dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan atau inefisiensi, sehingga memperkuat fungsi pengawasan dan akuntabilitas (IPDN, 2023)].

3. Kendala dan Tantangan Implementasi SAPP

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Banyak studi menyoroti bahwa kesiapan dan kompetensi SDM di unit-unit pelaksana masih menjadi tantangan utama. Kurangnya pemahaman mendalam tentang akuntansi berbasis akrual dan sistem aplikasi baru dapat menghambat implementasi SAPP secara optimal.

Resistensi terhadap Perubahan: Perubahan dari basis kas ke akrual serta adopsi sistem teknologi baru seringkali menghadapi resistensi dari para pelaksana di lapangan. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pelatihan yang tidak memadai, atau keengganan untuk beradaptasi dengan prosedur baru (IPDN, 2023;).

Kompleksitas Regulasi dan Harmonisasi: Meskipun sudah ada upaya standarisasi, regulasi terkait akuntansi pemerintah masih dianggap kompleks dan terkadang menimbulkan multitafsir atau ketidakseragaman dalam praktiknya. Diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara peraturan pusat dan daerah untuk menciptakan kerangka yang lebih konsisten.

Integrasi Sistem Informasi: Meskipun telah ada aplikasi terpadu seperti SAIBA, tantangan integrasi sistem informasi di berbagai kementerian/lembaga dan unit kerja masih ada. Kurangnya interoperabilitas antar sistem dapat menyebabkan fragmentasi data dan menghambat efisiensi pelaporan.

PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia menandai sebuah fase krusial dalam reformasi pengelolaan keuangan negara. Tujuan utama SAPP adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Pergeseran fundamental dari basis kas ke basis akrual, yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, merupakan inti dari upaya ini. Transformasi ini mengubah cara pemerintah mengakui dan melaporkan transaksi keuangannya, dari sekadar mencatat aliran kas menjadi pengakuan komprehensif atas aset, kewajiban, pendapatan, dan beban pada saat transaksi terjadi, terlepas dari pergerakan kas.

Peningkatan transparansi adalah salah satu dampak paling nyata dari implementasi SAPP. Laporan keuangan yang dihasilkan kini lebih informatif dan relevan, tidak hanya bagi auditor dan pembuat kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan adanya detail yang lebih kaya, laporan ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi finansial pemerintah, memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan dana publik. Aksesibilitas informasi ini diperkuat oleh komitmen pemerintah untuk mempublikasikan laporan keuangan melalui berbagai saluran, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan anggaran. Opini WTP yang konsisten dari BPK terhadap LKPP menjadi bukti nyata bahwa praktik

pelaporan keuangan pemerintah telah mencapai standar yang diakui dan dapat diandalkan

Dalam hal akuntabilitas, SAPP berbasis akrual telah menyediakan fondasi yang lebih kuat. Kemampuan untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi, termasuk piutang dan utang, memungkinkan pemerintah untuk menunjukkan pertanggungjawaban yang lebih menyeluruh atas semua sumber daya yang dikelola. Ini bukan hanya tentang berapa banyak uang yang masuk atau keluar, tetapi bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Laporan keuangan yang akurat menjadi alat vital bagi pertanggungjawaban kepada DPR dan masyarakat, memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih objektif dan berdasarkan data ([7]; IPDN, 2023 [6]). Selain itu, kualitas laporan keuangan yang meningkat juga mendukung efektivitas audit, membantu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan.

Meskipun demikian, perjalanan implementasi SAPP tidak luput dari tantangan. Kesiapan sumber daya manusia menjadi kendala yang persisten. Banyak personel yang masih bergulat dengan konsep akuntansi berbasis akrual dan penggunaan sistem aplikasi baru, yang menuntut pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kompetensi. Resistensi terhadap perubahan, baik karena kebiasaan lama maupun kurangnya pemahaman manfaat, juga menghambat adopsi penuh dan efisien. Kompleksitas regulasi dan kebutuhan harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah juga menjadi faktor yang dapat menghambat konsistensi implementasi.

Ke depan, rekomendasi dari berbagai literatur menekankan perlunya investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan yang relevan dan bersertifikat. Pemanfaatan teknologi informasi harus diperluas untuk mencapai integrasi sistem yang lebih baik dan memungkinkan pelaporan serta analisis data secara real-time. Terakhir, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi implementasi SAPP yang efektif dan efisien. Dengan mengatasi tantangan ini, SAPP akan semakin optimal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Utama Implementasi SAPP

Aspek Evaluasi	Sub-Aspek	Temuan Kunci dari Literatur	Referensi Utama
Transparansi Keuangan	Kualitas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan relevansi dan akurasi laporan berbasis akrual- Gambaran kondisi keuangan yang lebih Komprehensif	Jemsi, 2024

	Aksesibilitas Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan publikasi laporan melalui berbagai media (website, spanduk) - Dorongan partipasi publik dalam pengawasan 	Ahmad Arwani,2013; Reinata,2021
	Opini Audit BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Konsisten opini WTP terhadap LKPP menunjukkan kualitas dan keterpercayaan laporan. 	DJPb, 2024
Akuntabilitas Keuangan	Pencatatan Komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> - Basis akrual memungkinkan pencatatan seluruh transaksi (aset, kewajiban, dll) secara akurat - Meningkatkan kemampuan pertanggungjawaban atas dana publik. 	Jemsi,2024
	Mekanisme Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> - Kerangka laporan keuangan yang jelas (LRA, Neraca, LAK, CaLK) sebagai dasar pertanggungjawaban. - Laporan relevan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. 	IPDN,2023
	Efektivitas Pengawasan audit	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan akurat mempermudah audit internal dan eksternal. - Mendukung identifikasi potensi penyimpangan dan perbaikan berkelanjutan 	IPDN,2023
Kendala Implementasi	Keterbatasan SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kompetensi akuntansi berbasis akrual di kalangan pelaksana. - Menghambat optimalisasi dan efisiensi sistem 	Jemsi,2024
	Resistensi terhadap Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Keengganan personel untuk beradaptasi dengan prosedur dan sistem baru. - Memerlukan manajemen perubahan dan sosialisasi yang efektif 	IPDN,2023

	Kompleksitas Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keengganan personel untuk beradaptasi dengan prosedur dan sistem baru. - Memerlukan manajemen perubahan dan sosialisasi yang efektif 	
	Integrasi Sistem TI	<ul style="list-style-type: none"> - Tantangan interoperabilitas antar sistem yang berbeda di kementerian/lembaga. - Berpotensi menyebabkan fragmentasi data 	
Rekomendasi Pengembangan	Peningkatan Kapasitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi dalam pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. 	Jemsi, 2024
	Optimalisasi Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan dan integrasi sistem TI untuk pelaporan real-time dan analisis data 	Ahmad Arwani,2013;
	Penyederhanaan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> - Harmonisasi dan penyederhanaan kerangka regulasi untuk konsistensi implementasi. 	Kompasiana,2025

KESIMPULAN

Studi menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang berbasis akrual meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di Indonesia. SAPP meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara dengan menyajikan laporan keuangan yang lebih informasi, relevan, dan dapat diakses publik. Selain itu, akuntabilitas pemerintah juga meningkat dengan mekanisme audit yang lebih jelas dan efisien. Namun, SAPP masih menghadapi banyak masalah, seperti kekurangan sumber daya manusia, ketakutan terhadap perubahan, regulasi yang kompleks, dan integrasi sistem informasi. Untuk memaksimalkan manfaat SAPP, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi informasi, dan menyederhanakan dan menyamakan regulasi. Oleh karena itu, SAPP dapat berfungsi sebagai dasar penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Manossoh, 2015; Oktavia et al. , 2021. Akuntansi Pemerintahan.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/download/11072/10662/22096>

Sinurat, 2018; IJAB, 2023. Reformasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jurnal Akuntansi Publik.
<https://mail.ijab.ubb.ac.id/index.php/ijab/article/download/15/6/246>

Supriyanto, 2024. Tantangan Implementasi SAPP, Upaya Pengembangan dan Implementasi SAPP.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/download/4188/3744/16847>

IPDN, 2023. Mekanisme Pertanggungjawaban yang Jelas, Efektivitas Pengawasan Audit,
<https://repository.syekhnurjati.ac.id/9506/2/BAB%20I.pdf>

(Sinurat, 2018; IJAB, 2023). Opini Audit BPK yang positif, Efektivitas Pengawasan dan Audit, Basis Akrual untuk Akuntabilitas Menyeluruh.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/download/3417/1586/>

Manossoh, J. (2015). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Oktavia, R., et al. (2021). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dan Transparansi Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

Sinurat, A. (2018). Reformasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jurnal Akuntansi Publik.

IJAB. (2023). Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan. Indonesian Journal of Accounting and Business.

Mukhtaromin. (2023). Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Bagian Pertama. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Jago Akuntansi. (2017). Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP).

Bandi FEB UNS. (2009). Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat.

HashMicro. (2025). Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Klik Pajak. (2024). Mengenal Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Accurate.id. (2024). Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat: Pengertian dan Perannya.

Supriyanto, B. E. (2024). Evaluasi Efektivitas Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI di Indonesia.

Jemsi Journal. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Pelaporan.

Unsrat Repository. (2023). Implementasi dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintahan. Studi literatur dengan pendekatan kualitatif telah digunakan dalam penelitian terkait kebijakan akuntansi pemerintah daerah (Agregasi, 2022)[2].

Metode literature review juga diaplikasikan untuk mengeksplorasi perkembangan sistem akuntansi pemerintah, terutama peralihan dari basis kas ke basis akruaI (BSI Repository, 2023)[3].

JAKTA. (2024). Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) digunakan dalam kajian pengendalian internal dan SAP untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah.

Sugiyono (2017) merekomendasikan metode literature review sebagai salah satu metode penelitian kualitatif yang efektif untuk kajian teori dan kebijakan.

Undiksha. (2004). *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. eSkripsi USM.

[PDF] Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI ... (2010).

Azwar, T. N. A., & Subekan, A. (2020). EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BASIS AKRUAL (SAIBA) PADA MITRA KERJA KPPN GORONTALO DAN MARISA. Jurnal BPK.